

# LAPORAN DELAGASI DPR RI



Parliamentary Conference on  
Interfaith Dialogue: Working  
together for our common future

**BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN**

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia  
2023

13 - 15 Juni, 2023  
Marrakesh, Morocco





**LAPORAN DELEGASI DPR RI**  
**PARLIAMENTARY CONFERENCE ON INTERFAITH DIALOGUE:**  
**WORKING TOGETHER FOR OUR COMMON FUTURE**  
**MARRAKESH, 13 – 15 JUNI 2023**

---

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. THE PARLIAMENTARY CONFERENCE ON INTERFAITH DIALOGUE**

Pelaksanaan pertemuan *Parliamentary Conference on Interfaith Dialogue: Working together for our common future* diadakan di Kota Marrakesh, Maroko pada tanggal 13 - 15 Juni 2023. Tema untuk debat umum yang dibahas adalah menunjukkan pentingnya peran dialog dalam mendorong kerja sama dan kolaborasi antar negara untuk bekerja menuju masa depan yang sama. Debat umum kali ini bertujuan untuk memperluas dan membuka nuansa dialog yang lebih berdasarkan deklarasi, publikasi dan kegiatan Assemblu IPU yang lalu. Salah satu contohnya adalah deklarasi *2012 Quebec City Declaration on Citizenship, identity and linguistic and cultural diversity in a globalized world* yang mengakui pentingnya rasa hormat yang berimbang terhadap keragaman dengan inklusivitas sosial dan kohesi sebagai sarana untuk membangun kepercayaan di dalam dan di antara masyarakat dan sebagai prasyarat untuk kemajuan, kemakmuran dan kualitas hidup yang tinggi. Deklarasi *2017 St. Petersburg Declaration on Promoting cultural pluralism and peace through interfaith and inter-ethnic dialogue* yang mengakui pentingnya dialog dengan agama, budaya, dan etnis yang berbeda untuk tujuan perdamaian dan pluralisme budaya dan bahwa, sebagai perwakilan rakyat, parlemen dunia berkomitmen untuk memperkuat proses normatif dan kerangka hukum. Oleh karena itu, pertemuan IPU kali ini bertujuan untuk meperluas dialog antara, khususnya, kelompok-kelompok agama yang berbeda.

Keadaan dunia saat ini telah begitu rentan terhadap ancaman seperti perubahan iklim, konsumsi berlebihan yang mengakibatkan eksploitasi sumber daya, meningkatnya ketidaksetaraan, dan terutama meningkatnya intoleransi yang mendorong xenofobia terhadap kelompok yang berbeda. Ketegangan yang meningkat antara kelompok sosial yang dipicu oleh rezim penindas yang membatasi hak-hak sipil dan melakukan perang fisik dan ideologis di seluruh dunia. Hal ini menyebabkan semakin sulitnya melakukan dialog terbuka antara orang-orang yang berbeda agama, ras dan jenis kelamin.

Salah satu pemahaman penting yang diutamakan dalam diskusi tersebut adalah peran anggota parlemen dan pemimpin agama dalam mengikutsertakan warga negara dalam isu sosial. Dalam beberapa tahun terakhir, masalah seperti xenofobia telah menyebabkan perselisihan antar komunitas yang hanya diperburuk oleh kemajuan situs internet yang memungkinkan orang-orang ini untuk menyebarkan kebencian secara anonim untuk menghindari tanggung jawab. Selain itu, panel tersebut bertujuan untuk membahas kesenjangan gender antara perempuan dan pemuda dalam peran mereka saat menangani isu sosial, seperti kekurangan representasi wanita dan orang muda di posisi kepemimpinan. Semua perdebatan yang akan didiskusikan di pertemuan *Parliamentary Conference on Interfaith Dialogue: Working together for our common future* tidak hanya akan memecahkan masalah sistematis di dalam parlemen tetapi juga menawarkan solusi untuk melindungi HAM warga negara.

## B. DASAR PENGIRIMAN DELEGASI

Partisipasi Delegasi DPR RI dalam Sidang the *Parliamentary Conference on Interfaith Dialogue: Working Together for Our Common Future* di Marrakesh-Maroko pada tanggal 13 sampai dengan 15 Juni 2023 didasarkan pada surat tugas Nomor: 39/KU.05.01/ST/KSOI/05/2023. Pengiriman delegasi Indonesia bertujuan untuk meningkatkan citra positif Indonesia di forum internasional dan tercapainya kepentingan nasional Indonesia melalui keikutsertaan dalam Sidang the *Parliamentary Conference on Interfaith Dialogue: Working Together for Our Common Future* di Marrakesh-Maroko.

## C. SUSUNAN DELEGASI

Delegasi DPR RI dalam Sidang the *Parliamentary Conference on Interfaith Dialogue: Working Together for Our Common Future* di Marrakesh, Maroko dipimpin oleh Ketua BKSAP DPR RI Dr. H. Fadli zon S.S, M.SC dengan susunan Delegasi sebagai berikut:

NO.	N A M A	NO	POSISI	FRAKSI
1.	Dr. H. Fadli Zon S.S., M.SC	86	Ketua BKSAP DPR RI/ Ketua Delegasi Anggota Komisi I	Partai Gerindra
2.	H. Sukamata Mantamiharja, PH.D	445	Wakil Ketua BKSAP/ Anggota Komisi I	Partai Keadilan Sejahtera
3.	IR. H. Achmad Hafisz Tohir	487	Wakil Ketua BKSAP/ Anggota Komisi XI	Partai Amanat Sosial
4.	Syaikhul Islam, LC., M. SOSIO	31	Anggota BKSAP Anggota Komisi VII	Partai Kebangkitan bangsa

NO.	N A M A	NO	POSISI	FRAKSI
5.	H. Syahrul Aidi Maazat, LC., MA	418	Anggota BKSAP Anggota Komisi V	Partai Keadilan Sejahtera
6.	Primus Yustisio, S.E., M.A.P.	498	Anggota BKSAP Anggota Komisi XI	Partai Amanat Sosial

#### D. PERSIAPAN PELAKSANAAN TUGAS

Substansi dan Materi yang dijadikan referensi bagi Delegasi DPR RI dipersiapkan Sekretariat Jenderal DPR RI, dalam hal ini Biro Kerja Sama Antar Parlemen dengan dukungan dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

## II. ISI LAPORAN

### A. AGENDA ACARA

Tuesday, 13 Juni 2023	
11:00 – 12:30	<b>Opening Session</b> of the Parliamentary Conference on Interfaith Dialogue
12:30 – 14:00	<b>Lunch break</b>
09:45 – 10:00	<b>High-level Panel</b> – Track 1 (The Rule of Law)  <i>Working together for the promotion of the rule of law: Good practices and challenges</i>
10:00 – 10:30	<b>High-level panel</b> – Track 2 (Peace and inclusion)  <i>Promoting regional and global peace through intra-faith dialogue</i>
19:00 – 20:30	<b>Inaugural cocktail</b>
Wednesday, 14 June 2023	
09:00 – 12:30	<b><u>General Debate (Opening)</u></b>  <i>Parliaments and religious leaders: Promoting dialogue, working together for our common future</i>
09:00 – 10:30	<b><u>Panel</u></b> – Track 1 (The rule of law)  <i>Religion and belief in different secular systems: Examples from around the world</i>
11:00 – 13:00	<b><u>Panel</u></b> – Track 2 (Peace and Inclusion)  <i>How can parliamentarians cooperate with religious communities and faith-based organizations to mobilize society for greater moderation, solidarity and inclusion?</i>
13:00 – 14:30	<b>Lunch break</b>
14:30 – 18.30	<b><u>General Debate (Continuation):</u></b>  <i>Parliaments and religious leaders: Promoting dialogue, working together for our common future</i>
14:30 – 16:30	<b><u>Panel</u></b> – Track 1 (The Rule of Law)

	<i>Clarifying the relationship between the rule of law and freedom of religion or belief to preserve statehood and citizenship</i>
<b>17:00 – 18:30</b>	<p><b>Panel</b> – Track 2 (Peace and inclusion)</p> <p><i>Different mandates, common goals: Religious actors and parliamentarians as allies for promoting gender equality and youth participation</i></p>
<b>19:00</b>	<b>Cultural Evening</b>
<b>Thursday, 15 Juni 2023</b>	
<b>09:00 - 13:00</b>	<p><b>General Debate (Continuation and closing):</b></p> <p><i>Parliaments and religious leaders: Promoting dialogue, working together for our common future</i></p>
<b>09:00 – 10:30</b>	<p><b>Panel</b> – Track 2 (Peace and Inclusion)</p> <p><i>Promoting trust and mutual recognition: Contributions of religious actors and parliamentarians to counter hate speech, incitement to violence and digital challenges to democracy</i></p>
<b>11:00 – 13:00</b>	<p><b>Panel</b> – Track 1 (The Rule of Law)</p> <p><i>Legislators and religious leaders as bridge builders: Promoting rights and fundamental freedoms for more just and cohesive societies</i></p>
<b>13:00 – 14.30</b>	<b>Lunch break</b>
<b>14:30 – 15:30</b>	<p><b>Closing Session</b></p> <p>Panel reports</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adoption of high-level Declaration</li> </ul>

## B. INAUGURAL SPEECH

Dalam Sesi Pembukaan Inter-Parliamentary Union Conference, Yang Mulia Raja Mohammed VI memberi sambutan baik kepada peserta dan terutama kepada IPU yang telah berhasil menyatukan anggota parlemen, dalam kapasitas mereka sebagai legislator dan perwakilan dari sesama warga negara, para pemimpin agama, cendekiawan terkemuka, pakar dan peneliti dari seluruh dunia dalam konferensi tahun ini. Selanjutnya, ia berharap hasil diskusi dan debat hari ini akan mengarah pada kesimpulan dan solusi yang konstruktif, serta yang dapat mempersatukan pemeluk agama yang berbeda, memastikan kerukunan, perdamaian dan teta[ saling menghormati. Raja Mohammed VI juga mencatat kekuatan informasi yang diperoleh oleh Inter-Parliamentary Union's berkaitan dengan tema debat hari ini diharapkan akan memperkaya diskusi dan debat yang akan disajikan pada hari ini, yang tentunya harus didasarkan dialog yang serius, bermakna dan konstruktif.



Salah satu aspek yang paling penting dari pidato Raja Mohammad adalah adanya kecaman publik terhadap ekstremisme dan tindakan kekerasan yang telah dilakukan oleh kelompok-kelompok teroris yang menggunakan agama sebagai alasan untuk membenarkan tindakan mereka. Oleh karena itu, beliau menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para pemimpin politikus, pemimpin agama dan intelektual yang telah berkumpul dalam konvensi hari ini. Ia mengatakan bahwa ia percaya semua peserta yang hadir didalam ruangan itu telah setuju pada misi umat manusia untuk bekerja bersama dan hidup berdampingan satu sama lain terlepas dari perbedaan agama atau doktrin. Namun, dia menekankan pentingnya mewujudkan kata-kata dan memiliki keinginan kolektif untuk meninjau kembali isu-isu yang dibahas dalam konferensi hari ini. Untuk mencapai reformasi ini, warga negara akan

membutuhkan upaya pedagogis dan pendidikan oleh sekolah, media, lembaga keagamaan, dan platform debat publik yang bertanggung jawab sebagai sarana untuk menghilangkan konsep kebencian radikal dan mempelajari kembali kerukunan berdasarkan rasa hormat terhadap agama lain.

Sehubungan dengan diskusi saat ini, raja mengingatkan peserta bahwa meskipun Islam adalah agama negara Maroko, sebagai Raja Maroko dan Amirul Mukminin, ia mempunyai peran penting untuk memastikan kebebasan praktik ritual keagamaan serta perlindungan Morrocon Yahudi dan Kristen dari negara lain. Dia juga menyebutkan kontribusi Maroko atas pembentukan dan penataan Global Counterterrorism Forum, yang mereka telah menjadi salah satu pemimpin selama tiga periode antara 2015 hingga 2022. Selain itu, dia juga mengakui Liga Ulama Mohammedia - salah satu dari mitra utama dalam penyelenggaraan konferensi ini - Institut Mohammed VI untuk Pelatihan Imam, Murshidin dan Murshidats, dan Yayasan Mohammed VI Ulama Afrika, yang menyatukan dan mengoordinasikan upaya para sarjana Muslim Afrika untuk memberikan pemahaman dan mengangkat nilai-nilai ini.

## C. OPENING SESSION

### 1. Pidato dari Mr. Duarte Pacheco, President of the Inter-Parliamentary Union



Mr. Duarte Pacheco, selaku Presiden of the Inter-Parliamentary Union, mengakui mitra terhormat dari konferensi IPU hari ini, khususnya Religions for Peace, yang telah bekerja sama erat dengan IPU selama proses persiapan. Selain itu, pengakuan juga disampaikan kepada The United Nations Alliance of Civilizations dan Mohammedia League of Religions

Scholars yang telah memastikan untuk mempersiapkan program yang kuat, bervariasi dan inklusif.

Mr. Pacheco mengingatkan krisis solidaritas yang telah dialami dunia sejak akhir pandemi. Saat ini banyak terjadi krisis seperti konflik bersenjata, meningkatnya ketidaksetaraan, darurat iklim dan penurunan ekologis. Dia percaya bahwa meskipun anggota parlemen dan agama dan kepercayaan memiliki mandat yang berbeda, keduanya mempunyai tujuan sama untuk melayani dan memprioritaskan komunitas mereka dan oleh sebab itu mereka adalah pejuang yang tepat dalam perjuangan untuk keadilan sosial dan hidup berdampingan secara damai.

Mr. Pacheco selanjutnya mencatat pekerjaan-pekerjaan IPU sebelumnya dalam menangani isu-isu inklusi, koeksistensi dan perdamaian. Misalnya dalam Sidang IPU ke-127, parlemen mengakui pentingnya menyeimbangkan rasa hormat terhadap keragaman dengan inklusivitas sosial. Selanjutnya, pada Sidang IPU ke-137 di St. Petersburg tahun 2017, di mana para Anggota mengakui bahwa dialog dengan agama, budaya dan etnis sangat penting untuk perdamaian dan pluralisme budaya. Akhirnya pada assembly Majelis IPU ke-146 di Manama, parlemen mengakui pentingnya dialog, pendidikan dan peningkatan kesadaran sebagai alat untuk melawan intoleransi dan mendorong inklusi dan hidup berdampingan secara damai.

Mr. Pacheco menyatakan bahwa dengan bergabungnya suara dari komunitas parlementer, delegasi tingkat tinggi, pejabat pemerintah, pemimpin agama dan kepercayaan, perwakilan dewan antar agama, organisasi berbasis agama, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil lainnya, majelis hari ini dapat menjadi ruang di mana komunitas dapat direpresentasikan dan dipersiapkan menjadi tatanan, solidaritas, moderasi, dan inklusi. Yang terpenting, anggota rapat IPU hari ini dapat tetap mendorong pelaksanaan hak asasi manusia yang mendasar seperti kebebasan berpikir, berkeyakinan, beragama atau kepercayaan, kebebasan berkumpul dan kebebasan berekspresi bagi masyarakatnya masing-masing.

## **2. Pidato dari Mr. Martin Chungong, Secretary General of the Inter-Parliamentary Union**

Mr. Martin Chungong, sekretaris jenderal IPU mengingatkan sebuah dokumen dari abad ketujuh yang disebut the Charter of Medina. Dokumen tersebut merupakan konstitusi tertulis pertama dalam Islam yang mengatur hubungan antara Nabi Muslim Muhammad, para pengikutnya, dan penduduk Madinah, yang juga termasuk orang Yahudi. Konstitusi ini merinci hak dan

kewajiban warga Madinah, terlepas dari agama mereka. Ini menyoroti salah satu nilai inti dari IPU, yaitu Inklusif.



Mr. Chungong memperkenalkan Bagian 1 dari the Parliamentary Report mengenai Agama dan Kepercayaan. Laporan tersebut membahas keterlibatan kelembagaan parlemen atas agama atau kepercayaan. Laporan ini ditulis berdasarkan penelitian dan praktik baik yang dibagikan oleh Anggota Parlemen dan para pakar di bidang ini. Keterlibatan parlemen sebagai institusi di dalam pembahasan agama dan kepercayaan melakukan beberapa hal seperti memberikan kursi untuk agama minoritas, komite parlemen yang berurusan dengan agama atau kepercayaan, doa yang diadakan di awal sesi, kode pakaian parlemen, peringatan hari raya, acara keagamaan oleh parlemen.

Laporan ini dibuat dengan struktur yang selalu dinamis, dan akan terus berkembang karena para anggota parlemen memiliki berbagai praktik dan perspektif mereka sendiri-sendiri. Temuan-temuan ini akan didokumentasikan dalam Bagian 2 laporan yang akan melihat pengalaman para anggota parlemen yang terlibat dalam isu-isu ini. Mr Chungong berharap anggota majelis melakukan perbincangan yang memperkaya pembangunan masyarakat yang lebih damai, inklusif, dan adil di mana supremasi hukum berlaku, kebebasan dasar semua manusia dihormati, dan tidak ada yang tertinggal.

### 3. Pidato dari Ms. Heela Yoon, Afghan Peacebuilder



Ms. Heela Yoon saat menceritakan pengalaman hidup beliau, di Opening session

Ms. Heela Yoon berbagi pengalaman pribadinya dengan konflik antaragama yang terjadi di negara asalnya, Afghanistan. Dia mengingatkan kepada para anggota, bahwa sudah lebih dari 600 hari sejak rezim Taliban menutup sekolah dan universitas untuk anak perempuan Afghanistan. Keputusan ini diambil tanpa dasar agama apapun. Selain itu, dia berbicara tentang kakeknya, yang sekarang terbaring di kuburan tak bertanda dan ibunya yang pernah ditembak 2 kali. Konflik dengan menggunakan senjata sebagai keyakinan agama telah memicu perang yang menyebabkan jutaan dan jutaan orang Afghanistan melarikan diri dan menjadi pengungsi.

Ms. Heela Yoon kemudian melanjutkan bahwa organisasinya Afghan Youth Ambassadors for Peace, sebuah organisasi akar rumput masyarakat sipil bekerja pada lokalisasi perdamaian dan pendidikan di provinsi-provinsi di bagian timur. Organisasi tersebut telah melatih lebih dari 100 perempuan dan laki-laki muda di Afghanistan untuk mencegah ekstremisme kekerasan, dialog pembangunan perdamaian antaragama dan kesetaraan gender. Bukan hanya itu, mereka telah mendukung lebih dari 5000 keluarga di Afghanistan melalui Proyek Afghan for Afghan menjadikan wanita Afghanistan sebagai penanggap pertama krisis kemanusiaan. Dari pengalaman ini, dia telah belajar cara terbaik untuk melakukan dialog adalah melalui pendekatan dari bawah ke atas karena ini dapat memberikan ruang bagi setiap orang untuk merasa terlibat dan didengarkan, menciptakan toleransi dalam komunitas mereka.

Bahkan sekarang, perempuan Afghanistan masih menunjukkan ketangguhan dan memperjuangkan hak-hak mereka. Dia percaya melalui lokalisasi dan keterlibatan yang berarti dengan setiap pemangku

kepentingan dan tanpa pengecualian, Afghanistan dapat mencapai perdamaian yang berkembang. Oleh karena itu, ia mengimbau kepada semua untuk "Bekerja dengan anak muda dan jangan hanya mengajak mereka untuk memenuhi kuota". Dia memastikan bahwa populasi muda ingin menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan dan tidak hanya menjadi konsultan. Tak hanya itu, ia mengimbau para pemimpin yang hadir untuk fokus dan memberikan kesempatan bagi inisiatif akar rumput dan khususnya yang dipimpin oleh perempuan muda.

#### 4. Pidato dari Ildephonse Niyokindi, Global Peacebuilding Officer of TEARFUND



Tuan Ildephonse Niyokindi sebagai pejabat Global Peacebuilding memberikan kisah tentang masa kecilnya yang telah tinggal di negara yang mempunyai banyak melakukan kekerasan dan karena hal itu, membuatnya berkomitmen menjadi pejuang perdamaian. Dia terus mendukung berbagai kelompok seperti kelompok sektarian, suku dan kelompok etnis, untuk mengedepankan dialog untuk memberikan jalan keluar atas perbedaan mereka secara damai dan dengan demikian mempertimbangkan keragaman sebagai kekayaan. Meskipun beberapa denominasi agama memiliki kesamaan, mereka akan selalu memiliki perbedaan yang menimbulkan kecemburuan dan ketidakpercayaan antara komunitas. Ketegangan yang meningkat antara kelompok keyakinan agama yang berbeda dapat menyebabkan konflik yang bahkan dapat memicu perang dingin. Oleh karena itu, pentingnya menyoroti dialog antaragama dan bagaimana hal itu dapat membantu meredakan konflik dan memperjuangkan perdamaian dan koeksistensi.

Dialog antaragama memungkinkan para pemimpin agama untuk memahami kebijakan, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pandangan mereka untuk lebih meningkatkan aksi-aksi para pemimpin politik. Dengan semua itu, Pak Niyokindi berharap hasil majelis hari ini dapat digunakan untuk mempromosikan suasana yang aman untuk kaum yang lebih rentan, dan memungkinkan mereka untuk bekerja dan belajar melalui praktik keagamaan mereka. Selain itu orang-orang yang berkepentingan atas majelis ini harus memastikan bahwa network untuk orang-orang yang berkepentingan di majelis ini mendapatkan ruang dengan para konstituennya untuk mencari solusi dan menjadi pendengar baik yang dapat mengusulkan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan. Dia juga menyebutkan pentingnya memastikan perlindungan penduduk dan kemudahan pemerataan penggunaan sumber daya negara.

Mr Niyokindi juga menyoroti tujuan utama lain dari pertemuan hari ini. Bapak Niyokindi mencatat bagaimana setengah dari populasi terdiri dari kaum muda di bawah usia 30 tahun, namun mereka kurang berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan yang dapat mengubah masa depan mereka. Dia menekankan bahwa perbedaan kaum muda di dalam melakukan pengambilan keputusan, adalah kelemahan kontraproduktif dan merupakan masalah yang perlu segera ditangani.

Terakhir Pak Niyokindi, mengatakan bahwa sebab tidak adanya dialog antaragama, terutama persahabatan hubungan antaragama, orang dapat dengan mudah terlibat dalam ujaran kebencian yang menggambarkan orang dari agama lain sebagai "musuh" atau "hal yang lain". Politisi dan pejabat lainnya harus berusaha untuk memastikan bahwa orang memiliki kesempatan untuk pergi ke sekolah yang sama, tempat kerja yang sama dan ruang publik yang sama, di mana kelompok agama yang berbeda dapat dengan mudah berbaur dan bekerja sama.

## **5. Pidato dari Nazila Ghanea, UN Special Rapporteur on the Freedom of Religion or Belief**

Ms. Nazila Ghanea, selaku UN Special Rapporteur on the Freedom of Religion or Belief menekankan pentingnya pemikiran, perkataan, dan tindakan yang disampaikan selama diskusi hari ini. Sebagai Anggota Parlemen dan Pemimpin Agama atau Keyakinan, para anggota wajib memahami dampak kata-kata mereka dan keterlibatan dalam dialog terbuka. Dengan demikian para anggota Parlemen dan Pemimpin Agama dan Keyakinan tersebut dapat mempengaruhi pengikutnya untuk terlibat dalam kebebasan berpikir dan berbicara dengan harapan dapat membawa lebih banyak diskusi yang memberikan jalan keluar atas krisis dunia saat ini.



Salah satu tantangan yang disebutkan adalah diskriminasi, baik dalam sistem pendidikan maupun tempat kerja, yang secara khusus menargetkan agama dan/atau kepercayaan seseorang. Hal ini bisa terkait dengan seseorang yang dipaksa untuk pindah agama oleh otoritas di sekolah atau di tempat kerja di mana mereka melakukan pekerjaan berbahaya karena kasta mereka, atau karena ketidakpatuhan terhadap tradisi yang dominan. Tidak hanya beberapa individu yang dilarang melakukan kegiatan kolektif seperti ibadah dan mengerjakan ajaran agama, beberapa tempat ibadah telah mengalami penyerangan langsung, kekerasan massa dan penodaan. Bahkan pengacara sering merasa takut akan akibatnya ketika menentang mayoritas yang memiliki prasangka buruk, sehingga menyebabkan hilangnya keadilan ketika menyangkut pelanggaran keyakinan agama. Selain itu, iklim intoleransi telah diperparah oleh forum online yang mendorong pemikiran kelompok dan secara jelas mengobarkan api permusuhan kepada ekstremis.

Oleh karena itu mengapa, Anggota Parlemen dan Pemimpin Agama atau Keyakinan harus memainkan peran vital mereka dalam melawan ketidakadilan atas hak asasi manusia ini. Majelis harus mulai dengan memastikan bahwa semua pemimpin tidak diskriminatif, dan bahwa semua agama dan kepercayaan diperlakukan sama di bawah hukum. Ini hanya dapat dilakukan melalui dialog terbuka dan jujur antara anggota untuk memastikan bahwa kerangka konstitusional dan hukum memberikan perlindungan yang memadai untuk semua kepercayaan, termasuk non-kepercayaan, dan termasuk minoritas yang berbeda dalam tradisi kepercayaan. Selain itu, dialog akan membantu memastikan bahwa tidak ada orang yang secara tidak sengaja terpinggirkan dalam pengembangan

dan penyusunan undang-undang. Mereka juga dapat, bekerja sama dengan komunitas agama dan kepercayaan, mengembangkan proses peningkatan kesadaran, pendidikan dan pelatihan untuk pejabat negara termasuk badan peradilan, penegak hukum, dan otoritas kota untuk mengatasi sikap yang sering menjadi akar penyebab pelanggaran sehari-hari terhadap kebebasan beragama atau berkeyakinan.

Pembahasan hari ini tidak hanya terbatas pada penanganan konflik dalam masalah agama atau kepercayaan tetapi juga dapat membantu dalam memerangi kemiskinan dan memperjuangkan pembangunan berkelanjutan. Contoh dari hal ini ditunjukkan dalam kerangka *The Faith for Rights*, yang merupakan model yang menawarkan alat teoretis dan praktis untuk memobilisasi landasan etis dan spiritual dari tradisi agama atau kepercayaan dalam membela hak asasi manusia dan perdamaian.

#### **D. General Debate**

Pelaksanaan general debate akan memberikan kesempatan kepada Anggota Parlemen, pemuka agama, organisasi berbasis kepercayaan dan para ahli untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik tentang bagaimana anggota parlemen dan agama serta aliran kepercayaan bersikap dalam menghadapi permasalahan utama yang mempengaruhi *the rule of law*, kedamaian dan inklusi. Kegiatan general debate juga dapat menjadi platform untuk mengidentifikasi berbagai tantangan di masa sekarang dan yang akan datang di level nasional, regional dan internasional, serta memberikan saran bagi para anggota parlemen dan tokoh-tokoh agama dalam menerapkan kerjasama yang lebih optimal.

Dalam sesi General Debate Dr. Fadli Zon, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen dan ketua Delegasi Indonesia, menyampaikan pidato dari Delegasi Indonesia. Dalam pidatonya Dr. Fadli Zon mengedepankan bahwa keterlibatan Anggota Parlemen dan para tokoh agama sangat diperlukan dalam menyikapi berbagai permasalahan saat ini, seperti moderenisasi, toleransi, inter dan intra faith dialogue, counter-extremism dan variable-variabel kehidupan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, seperti penguatan ekonomi, lingkungan dan fasilitas publik.

Anggota parlemen dan pemuka agama juga dapat berkerja sama dalam mengawasi dan memastikan optimalnya peram pemerintah termasuk dalam penggunaan anggaran negara. Pemuka agama juga dapat terlibat secara intensif dalam penyusunan undang-undang, dimana mereka dapat memberikan masukan berharga yang mewakili kepentingan komunitas agama.



Dalam konteks negara Indonesia, sebuah negara kepulauan yang sangat beragam, pemuka agama memegang peran unik dalam mempengaruhi pandangan publik. Keterlibatan aktif mereka memberikan kontribusi positif dan nyata terhadap berbagai isu-isu strategis, seperti modernisasi, dialog antar agama dan disinformasi. Melalui kerjasama yang baik, kita dapat memanfaatkan kebijaksanaan kolektif dan pengalaman dari para anggota parlemen dan pemuka agama dalam mengatasi masalah yang muncul. Untuk dapat mewujudkan ini diperlukan kepercayaan dan saling menghargai antara kedua pihak.

#### E. Track 1 (The Rule of Law)

##### 1. High-level panel 1: *Working together for the promotion of the rule of law: Good practices and challenges*

Dalam panel ini, pembahasan difokuskan pada peran parlemen dalam melindungi kebebasan beragama dan berkeyakinan serta peran dan tanggung jawab legislator dalam merekonsiliasi hak-hak yang saling bertentangan untuk memastikan bahwa supremasi hukum tetap terjaga, sekaligus menjamin hak dan kebebasan warga negara lainnya ditegakkan.

##### 2. Panel: *Religion and belief in different secular systems: Examples from around the world*

Panel ini akan fokus pada menavigasikan sekularisme dan berbagai ekspresinya di seluruh dunia. Selain itu, mereka akan membahas di mana harus menentukan garis batas antara hal-hal yang berpengaruh antara agama dan pemerintah.

##### 3. Panel: *Clarifying the relationship between the rule of law and freedom of religion or belief to preserve statehood and citizenship*

Panel ini bertujuan untuk membahas pentingnya anggota parlemen dalam menegakkan hak asasi manusia dan keadilan sosial, serta pentingnya tokoh-tokoh agama yang dapat menjadi sekutu penting dalam mempromosikan supremasi hukum. Panel ini akan menampilkan praktik-praktik baik di mana parlemen dan tokoh agama telah menunjukkan kerja sama aktif untuk mempromosikan supremasi hukum, dan berupaya mengatasi tantangan yang sedang berlangsung. Tantangan-tantangan ini termasuk ketegangan antara undang-undang sekuler dan beragama atau di mana retorika berbasis agama merusak legitimasi dan efektivitas lembaga negara.

Dalam panel ini Delegasi Indonesia menyampaikan intervensi melalui anggota delegasi IR. H. Achmad Hafisz Tohir. Dalam intervensinya beliau menyampaikan bahwa melalui pelaksanaan tugas utamanya yaitu legislasi, pengawasan dan anggaran, parlemen dapat memiliki peran kunci sebagai penjaga supremasi hukum, HAM, serta terpenuhinya rasa keadilan dalam masyarakat. Terlebih Parlemen juga berperan secara signifikan dalam kaitannya dengan upaya untuk merealisasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 16 (SDGs 16), mengenai perlunya terbangun korelasi yang kuat antara perdamaian, keadilan dan penguatan institusi.



Ir. H. Achmad Hafisz Tohir saat menyampaikan intervensi delegasi Indonesia

Tokoh-tokoh agama dapat menjadi mitra yang penting bagi parlemen dalam rangka mempromosikan supremasi hukum, terutama dengan mempertimbangkan adanya fakta bahwa tokoh dapat memberikan pengaruh kepada bagaimana seseorang dapat berpartisipasi dalam masyarakat, bagaimana hak-hak sebagai warga negara dipergunakan, serta bagaimana mereka memandang negara dan posisi mereka terhadap negara tersebut.

Dalam beberapa konteks, agama dan kepercayaan juga tercermin dalam struktur pemerintahan sehingga penegakan hukum juga bersinggungan dengan hukum agama. Hal ini dapat menjadi tantangan, terutama ketika ada perselisihan antara undang-undang sekuler dan agama atau ketika retorika berbasis agama melemahkan legitimasi dan efektifitas institusi negara. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan kerjasama yang optimal antara Anggota Parlemen dan pemuka agama.

#### **4. Panel: *Legislators and religious leaders are bridge builders: Promoting rights and fundamental freedoms for more just and cohesive societies***

Panel ini akan mengeksplorasi berbagai cara para legislator dan pemimpin agama berfungsi sebagai pembangun jembatan antara berbagai sektor masyarakat, untuk mempromosikan hak-hak semua warga negara. Hal ini juga akan mempertimbangkan berbagai cara untuk memperbaiki dialog antar negara, sambil menekankan pentingnya memisahkan pengaruh kepentingan politik dan agama.

### **F. Track 2 (Peace and Inclusion)**

#### **1. High-level panel 2: *Promoting regional and global peace through intra-faith dialogue***

Panel ini akan mempertemukan para pemimpin agama, anggota parlemen, dan pakar yang mempunyai pengalaman langsung dengan konflik intra-agama untuk mempertimbangkan dampaknya terhadap pembentukan politik dan kontribusi khusus yang dapat dilakukan dalam dialog parlementer dengan aktor-aktor agama dalam menengahi konflik sektarian dan mendorong hidup berdampingan secara damai.

Dalam sesi ini H. Sukamta Mantamiharja PH.D., anggota delegasi dan Wakil Ketua BKSAP DPR RI, menyampaikan intervensi mengenai pentingnya intra-faith dialogue dalam mewujudkan keamanan global dan regional. Sebagai negara dengan lebih dari 17.000 pulau yang merupakan rumah bagi 200 grup etnis dengan lebih dari 300 bahasa, Indonesia memahami pentingnya untuk mewujudkan pengertian antara berbagai kelompok sebagai dasar dalam mewujudkan stabilitas sosial.



H. Sukanta saat menyampaikan intervensi delegasi Indonesia

Kerjasama antara berbagai kelompok agama dan masyarakat sangat dibutuhkan, dimana dialog intra-faith dan inter-faith perlu dilaksanakan dan lebih difokuskan pada isu-isu konkrit yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat di masa yang akan datang. Dengan perwujudan hal tersebut, diyakini pencapaian kedamaian dapat diwujudkan tidak hanya dalam konteks intra-faith, namun juga dalam lingkup nasional, regional dan global.

## **2. Panel: *How can parliamentarians cooperate with religious communities and faith-based organizations to mobilize society for greater moderation, solidarity and inclusion?***

Panel ini akan melibatkan anggota parlemen dan perwakilan dari anggota organisasi berbasis agama untuk menampilkan berbagai contoh dialog atau bentuk kerja sama dan bagaimana hal ini dapat berkontribusi kepada masyarakat agar bisa menjadi lebih kohesif dan inklusif.

Dalam panel ini Delegasi Indonesia menyampaikan intervensi melalui anggota delegasi H. Syahrul Aidi Maazat, L.C., M.A. Dalam intervensinya beliau menyampaikan bahwa anggota parlemen, sebagai representasi rakyat, memiliki modal penting dalam mewujudkan hal ini, terutama berkaitan dengan hubungan yang dimiliki dengan masyarakat yang diwakilinya termasuk komunitas beragama dan organisasi berbasis agama. Indonesia sebagai negara yang memegang prinsip bhineka tunggal ika, kebebasan beragama dijamin melalui undang-undang. Walaupun mayoritas masyarakat beragama islam, Indonesia tidak memberlakukan aturan berdasarkan satu agama tertentu. Dimana Indonesia mengedepankan keberagaman tersebut sebagai sebuah nilai yang menyatukan bangsa.



Namun dalam mewujudkan hal ini kami juga mempertimbangkan dampak variable lain, seperti globalisasi, yang dapat mempengaruhi perilaku dan budaya di masyarakat. Hal ini merupakan hal utama mengapa Indonesia memosisikan modernisasi sebagai salah satu strategi efisien untuk membangun keutuhan sosial dan kedamaian di masyarakat. Salah satu langkah konkrit dalam mewujudkan ini adalah pelaksanaan program Forum for Inter-Religious Harmony (FKUB/ Forum Kerukunan Antar Umat Beragama) dimana parlemen Indonesia memiliki peran penting dalam menginisiasi dan memastikan tersedianya dukungan anggaran dan perlindungan.

### **3. Panel: *Different mandates, common goals: Religious actors and parliamentarians as allies for promoting gender equality and youth participation***

Panel yang dipimpin oleh... akan fokus pada kurangnya perwakilan perempuan dan pemuda di kursi parlemen. Meskipun masing-masing kelompok ini mewakili sekitar 50% dari populasi, baik perempuan maupun pemuda seringkali tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, panel ini akan mempertimbangkan jalan kerjasama antara parlemen dan tokoh agama untuk mendorong kesetaraan gender dan partisipasi pemuda yang lebih mendalam. Panel ini juga akan mengidentifikasi hambatan yang ada dan mempertimbangkan cara untuk mengatasinya.

#### 4. Panel: *Promoting trust and mutual recognition: Contributions of religious actors and parliamentarians to counter hate speech, incitement to violence and digital challenges to democracy*

Panel ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi kebebasan dalam ruang digital. Era digital baru ini telah menyediakan arena lintas batas dan bagi orang tak dikenal untuk melakukan dan bahkan mengoordinasikan tindakan yang dapat dikategorasi sebagai "hate-crime". Panel ini menantang parlemen untuk menggambarkan batas-batas seputar kebebasan berbicara dan di mana hal itu menjadi hasutan untuk melakukan kekerasan, dan menemukan cara untuk menerjemahkannya ke dalam ruang digital. Mereka juga harus mengidentifikasi akar penyebab yang mendorong ujaran kebencian yang berada dalam yurisdiksi mereka. Dokumen yang dibuat pada tahun 2019, "United Nations Strategy and Plan of Action on Hate Speech" akan menjadi salah satu alat pembantu penting dalam diskusi ini.

### G. PERTEMUAN BILATERAL

#### 1. Pertemuan bilateral dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kerajaan Maroko H.E. Rachid Talbi El Alami

Dalam pertemuan ini dibahas tentang kerja sama antara Indonesia dan Maroko di berbagai bidang dan langkah-langkah penguatan yang dapat diambil oleh kedua negara. Pertemuan ini juga menjadi kesempatan untuk memperkuat kerja sama yang sudah terjalin sejak dibukanya hubungan diplomatik pada tahun 1960.



Selanjutnya sebagai negara yang aktif di forum Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Organisasi Parlemen Negara Islam (PUIC), kedua negara sepakat untuk terus berkerjasama dalam mempromosikan perdamaian di antara negara-negara Islam, khususnya yang berada di kawasan Timur Tengah. Dalam kesempatan ini, Dr. Fadli Zon juga menyampaikan kembali undangan kepada Parlemen Kerajaan Maroko untuk hadir pada pelaksanaan Sidang Umum AIPA ke 44 di Jakarta pada bulan Agustus tahun 2023.

## 2. Pertemuan bilateral dengan Ketua Parlemen Republik Tanzania H.E. Dr. Tulia Ackson

Kedua parlemen menyambut baik peningkatan hubungan kerja sama kedua negara. Dalam pertemuan ini dibahas pentingnya kerjasama antar dua negara. Dalam kesempatan delegasi Tanzania juga menyampaikan permintaan dukungan bagi Ketua Parlemen Republik Tanzania H.E. Dr. Tulia Ackson dalam pencalonan dirinya sebagai President IPU pada the 147<sup>th</sup> IPU Assembly and Related Meeting yang akan dilaksanakan di Luanda – Angola pada tanggal 23 sampai dengan 27 Oktober 2023. Delegasi DPR RI menyambut baik pencalonan Ketua Parlemen Tanzania sebagai President IPU mewakili Geo Political grup Afrika.



Suasana pertemuan bilateral Delegasi Indonesia dengan Ketua Parlemen Tanzania

### III. PENUTUP

#### A. Anggaran

Anggaran yang digunakan dalam partisipasi delegasi DPR RI dalam pertemuan *Parliamentary Conference on Interfaith Dialogue: Working together for our common future* diadakan di Kota Marrakesh, Maroko pada tanggal 13 - 15 Juni

2023 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2023 dengan mata anggaran kegiatan: 001030.CF.5805.AEC.001.051.D.524211 dengan target kinerja atau hasil yang akan dicapai adalah meningkatnya citra positif Indonesia di forum internasional dan tercapainya kepentingan nasional Indonesia melalui pertemuan *Parliamentary Conference on Interfaith Dialogue: Working together for our common future* diadakan di Kota Marrakesh, Maroko pada tanggal 13 - 15 Juni 2023.

## B. Kesimpulan dan Rekomendasi

### 1. Kesimpulan

- Pertemuan *Parliamentary Conference on Interfaith Dialogue: Working together for our common future* diadakan di Kota Marrakesh, Maroko pada tanggal 13 - 15 Juni 2023 berjalan dengan lancar, dimana delegasi DPR RI berperan aktif dalam semua sesi dan menyampaikan pandangan serta intervensi.
- Pertemuan *Parliamentary Conference on Interfaith Dialogue: Working together for our common future* diadakan di Kota Marrakesh, Maroko pada tanggal 13 - 15 Juni 2023 merupakan pertemuan yang cukup bergengsi dan dihadiri oleh Ketua dan Anggota Parlemen dari berbagai negara serta tokoh-tokoh agama.
- Kehadiran Delegasi DPR RI dalam pertemuan ini dinilai sangat penting dalam bertukar pengalaman dan memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia dalam sesi-sesi yang membahas tentang pentingnya kerjasama antara Parlemen dengan tokoh-tokoh agama dalam mewujudkan stabilitas nasional, regional dan internasional.

### 2. Rekomendasi

- Hasil pelaksanaan pertemuan *Parliamentary Conference on Interfaith Dialogue: Working together for our common future* diadakan di Kota Marrakesh, Maroko pada tanggal 13 - 15 Juni 2023 perlu disampaikan kepada Alat Kelengkapan Dewan DPR RI terkait guna memastikan tindak lanjut sesuai bidang yang ditangani berdasarkan mekanisme di DPR RI.
- Hasil pelaksanaan pertemuan *Parliamentary Conference on Interfaith Dialogue: Working together for our common future* diadakan di Kota Marrakesh, Maroko pada tanggal 13 - 15 Juni 2023 dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk pembahasan isu-isu penting global dalam pelaksanaan pertemuan internasional yang akan diselenggarakan di Indonesia seperti AIPA dan MIKTA pada tahun 2023.

### C. Keterangan Lampiran

Laporan ini dilengkapi dengan lampiran dan/atau dapat diunduh melalui link sebagai berikut:

1. IPU Report of the Conference, <https://www.ipu.org/file/17314/download>
2. Marrakesh Communique, <https://www.ipu.org/file/17036/download>
3. Concept Note, <https://www.ipu.org/file/16553/download>
4. Draft Programme, <https://www.ipu.org/file/17002/download>
5. Description of sessions, <https://www.ipu.org/file/16934/download>
6. List of Participants, <https://www.ipu.org/file/17048/download>
7. List of speakers, <https://www.ipu.org/file/17094/download>
8. Foto-foto pelaksanaan kegiatan, <https://www.flickr.com/photos/inter-parliamentary-union/collections/72157721841288717/>

### D. Kata Penutup

Demikianlah pokok-pokok Laporan Keikutsertaan Delegasi DPR RI dalam kegiatan Parliamentary Conference on Interfaith Dialogue: Working Together for our Common Future tanggal 13 sampai dengan 15 Juni 2023 di Marrakesh – Maroko. Keikutsertaan delegasi DPR RI dalam kegiatan ini dapat berjalan dengan baik atas dukungan berbagai pihak, antara lain: Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Sekretariat Negara, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Rabat untuk kerajaan Maroko dan merangkap sebagai perwakilan Indonesia untuk Republik Islam Mauritania Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan semua pihak. Atas nama delegasi DPR RI, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan dan semoga dokumen laporan ini bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, Juli 2023  
a.n. Delegasi  
Ketua Delegasi/ Ketua BKSAP DPR RI

**Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc.**  
**A-86**